



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP  
IZIN TINGGAL ORANG ASING  
(STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG)**

**TESIS**

**Disusun Oleh :  
EDHIARTO SATRIYO BENGGALA  
221003631010553**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP

### IZIN TINGGAL ORANG ASING

(STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG)

### TESIS

Oleh :

**EDHIARTO SATRIYO BENGALA**

221003631010553

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, 30 Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Prof. Dr. Drs. Munawar Noor, M.S.**  
NIDK. 8825280018

Pembimbing II

**Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si**  
NIDN. 0618056501

Menyetujui,

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

**Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si**  
NIDN. 0618056501

**LEMBAR PENGESAHAN**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN  
TERHADAP IZIN TINGGAL ORANG ASING  
(Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang)**

Disusun Oleh :

**Edhiarto Satriyo Benggala**

NPM: 221003631010553

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI : ADMINISTRASI PUBLIK

**TESIS**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Semarang,

2024

1. Prof.Dr.Drs Munawar Noor, M.S  
Ketua Tim Penguji / Pembimbing
2. Dr Tri Lestari Hadiati, M.Si  
Penguji 2
3. Dr Charis Christiani, M.Si  
Penguji 3

.....  
.....  
.....

Mengesahkan

Dekan Fisip UNTAS Semarang

Prof Dr.Drs.Rini Werdiningsih, M.S

NIDN. 0621105901



## A. ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan terhadap izin tinggal orang asing serta faktor pendukung dan penghambatnya di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Fokus kajiannya mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi 4 variabel yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan terhadap izin tinggal orang asing dapat diimplementasikan dengan baik di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang. Dari aspek komunikasi, informasi yang berkaitan dengan kebijakan dapat ditransmisikan dengan baik, jelas, dan konsisten, sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan. Dari aspek sumberdaya, kondisi kualitas personel sudah memadai, namun secara kuantitas masih kurang atau belum sesuai dengan kebutuhan nyata. Para personel memiliki pemahaman yang baik tentang isi kebijakan, mematuhi regulasi, serta bertindak sesuai wewenangnya masing-masing. Fasilitas yang tersedia sudah memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari aspek disposisi, jajaran implementor memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, meskipun tidak ada insentif khusus untuk personel pengawasan. Dari aspek struktur birokrasi, tersedia *Standar Operating Prosedure* (SOP) sehingga para implementor memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Fragmentasi juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada kejelasan tugas, tanggung jawab, maupun hierarkhi dari jajaran implementor. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengawasan izin tinggal orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang meliputi dukungan anggaran, kualitas personel, dan berkembangnya Teknologi Informasi (TI). Faktor penghambatnya yaitu kuantitas personel dan luasnya wilayah kerja yang mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota. Jumlah personel dirasakan kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal, khususnya pengawasan lapangan.

**Kata Kunci :** Implementasi, pengawasan, izin tinggal, orang asing.